



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 54 / Kpts / RC.210 / B / 12 / 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPTIMALISASI LAHAN RESPONSIVE GENDER
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019, Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab program;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Lahan Responsive Gender Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan /OT.010/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPTIMALISASI LAHAN RESPONSIVE GENDER TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU : Petunjuk Teknis Optimalisasi Lahan Responsive Gender sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL,



SARWO EDHY
NIP 196203221983031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian; dan
5. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang pertanian provinsi.

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Tentang : Petunjuk Teknis Optimalisasi Lahan Responsive Gender Tahun
Anggaran 2020
Nomor : 54 / Kpts / RC.210/B/12/2019
Tanggal : 18 Desember 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di Indonesia adalah terjadinya degradasi lahan pertanian, baik dari segi kualitas dan kuantitas, yang diiringi oleh kondisi semakin berkurangnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian serta tuntutan pemenuhan kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang semakin tinggi. Dari aspek kualitas, kondisi kesuburan lahan pertanian semakin menurun. Berdasarkan hasil penelitian Balai Besar Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian bahwa sebagian besar kandungan bahan organik lahan sawah < 2 %. Selama periode 2012-2016, luas lahan pertanian di Indonesia berkurang 7%, dari 39,59 juta ha di Tahun 2012 menjadi 36,76 juta ha di Tahun 2016 (BPS, 2018). 32,53% dari luasan lahan pertanian tersebut merupakan lahan non sawah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari sisi tenaga kerja, selama kurun waktu Februari 2017 – Februari 2019, jumlah tenaga kerja sektor pertanian berkurang sekitar 1,58 juta jiwa (BRS BPS, Februari 2019). Oleh karena itu, program pembangunan pertanian memerlukan strategi yang terfokus pada peningkatan kesuburan lahan, optimalisasi lahan pertanian non sawah, pemberdayaan tenaga kerja sektor pertanian, dan peningkatan pendapatan petani.

Dengan dasar pemikiran tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengembangkan kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender melalui integrasi ternak kambing atau itik. Pilot project ini merupakan alternatif pemanfaatan lahan pertanian secara optimal sebagai upaya menambah pendapatan petani melalui pemberdayaan keluarga petani yang tersedia di sektor pertanian.

Pengembangan ternak kambing dan itik di lahan pertanian diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan petani, namun juga

memberikan solusi perbaikan kesuburan lahan pertanian. Pemanfaatan kotoran dan urine ternak tersebut sebagai pupuk organik telah terbukti secara empiris mampu meningkatkan kesuburan tanah. Melalui pilot project ini diupayakan keterlibatan rumah tangga petani, baik laki-laki dan perempuan secara proporsional agar diperoleh hasil yang maksimal. Disamping itu, keterlibatan gender ini dimaksudkan untuk menepis isu kesenjangan gender dalam bidang pertanian. Selanjutnya, pilot project ini diharapkan dapat merefleksikan kesetaraan gender dalam hal akses terhadap peluang atau kesempatan, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumberdaya, serta perolehan manfaat hasil-hasil kegiatan.

1.2. Tujuan

Tujuan kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender sebagai berikut:

- a. Optimalisasi lahan pertanian melalui integrasi ternak kambing/itik dan pemanfaatan limbah ternak (feses dan urin) sebagai pupuk organik;
- b. Menerapkan prinsip responsive gender (partisipasi petani laki-laki dan perempuan) dalam kegiatan Pilot Project optimalisasi lahan mendukung Ketahanan Pangan;
- c. Menyusun data terpisah dari pelaksanaan pengembangan pilot project optimalisasi lahan Responsive Gender;

1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender;
- b. Terlaksananya penerapan prinsip responsive gender (partisipasi petani laki-laki dan perempuan yang tergabung dalam Kelompok Tani/Gapoktan atau Kelompok Wanita Tani)
- c. Tersusunnya data terpisah dari pelaksanaan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender

1.4. Pengertian

1.4.1. Gender

Perbedaan-perbedaan sifat, peran, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang tidak berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan pada relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat.

1.4.2. Bias Gender

Diskriminasi yang terjadi mulai dari penyisihan/ pemunggiran perempuan dari program-program pembangunan sampai ke diskriminasi tingkat upah dan tindak kekerasan serta ketimpangan dari berbagai sumberdaya (seperti lahan usahatani, pendidikan, informasi, pelatihan, kredit), dll.

1.4.3. Peranan Gender

Perilaku yang diajarkan pada setiap masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang menjadikan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas dan tanggung jawab tertentu dipersepsikan sebagai peranan perempuan dan laki-laki.

1.4.4. Kesetaraan gender

Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

1.4.5. Keadilan Gender

Keadilan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan berdasar pada kebutuhan-kebutuhan mereka, mencakup perlakuan setara atau perlakuan yang berbeda akan tetapi dalam koridor pertimbangan kesamaan dalam hak-hak, kewajiban, kesempatan dan manfaat.

1.4.6. Pengarusutamaan Gender

Strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

1.4.7. Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender

Merupakan project pemanfaatan lahan tidur/ pekarangan dalam pengembangan ternak kambing/itik dan pemanfaatan kotoran serta urinanya sebagai pupuk organik untuk tanaman pangan hortikultura

1.4.8. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Merupakan rincian usulan kegiatan kelompok yang berisi komponen bahan/material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan dan pembelanjaan dana bantuan sosial.

1.4.9. Mesin Pencacah adalah sebuah mesin yang memiliki fungsi menghaluskan, menggiling kotoran hewan atau material organic sehingga ukurannya menjadi lebih halus dan lebih mudah untuk diolah sebagai pupuk organik.

1.4.10. Pupuk Organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa -sisa tanaman dan hewan.

BAB II

SPESIFIKASI TEKNIS

Pelaksanaan kegiatan pilot project optimalisasi lahan responsive gender mengacu pada norma, standar teknis dan kriteria, sebagai berikut :

2.1 Norma

Kegiatan pilot project optimalisasi lahan responsive gender melalui pengintegrasian ternak kambing/itik pada areal tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Kegiatan ini diarahkan pada optimalisasi lahan pertanian dan atau lahan pekarangan melalui pemanfaatan kotoran, serta urine ternak sebagai pupuk organik bagi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

2.2 Standar Teknis

Standar teknis pilot project optimalisasi lahan responsive gender melalui pengintegrasian ternak kambing/itik pada areal tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. sebagai berikut :

- a. Kelompok tani/ternak yang bersedia untuk mengembangkan budidaya ternak kambing atau itik.
- b. Bersedia menyediakan lahan untuk pembangunan kandang komunal dan tempat pengolahan pupuk organik. Luas lahan yang disediakan disesuaikan dengan jumlah ternak yang ada.
- c. Lahan yang digunakan pada kegiatan ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. Lahan bukan merupakan lahan dalam sengketa.
 2. Lahan dimanfaatkan selama kegiatan ini masih berlangsung.
 3. Lahan yang digunakan untuk kegiatan ini diusahakan secara swadaya oleh Kelompok Tani/Kelompok Ternak/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan tanpa ganti rugi.
 4. Segala perubahan yang terjadi selama kegiatan berlangsung harus dinyatakan dengan Surat Pernyataan/Berita Acara.
- d. Mencantumkan titik koordinat lokasi.

2.3 Kriteria

Kriteria lokasi dan petani pelaksana pilot project optimalisasi lahan responsive gender, sebagai berikut :

- a. Kelompok sasaran adalah Kelompok Tani/Kelompok Ternak/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani yang memiliki lahan, yang bersedia menyediakan

lahan sebagai lokasi kandang komunal dan tempat pengolahan pupuk organik pada daerah/areal pengembangan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

- b. Kelompok sasaran bersedia memelihara ternak dengan sistem komunal dan menjamin pakan dan kesehatannya dengan baik serta mengembangkan populasi ternak.
- c. Kelompok sasaran bersedia mendukung biaya operasional (bahan bakar, pelumas, pemeliharaan ternak, penyediaan pakan ternak/ HMT, dll).
- d. Kelompok penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Kelompok Ternak/Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani yang belum pernah mendapat bantuan kegiatan sejenis.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender melalui integrasi ternak kambing atau itik pada lahan pertanian diperuntukkan mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

3.1 Cara Pelaksanaan

Pola pelaksanaan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender dilakukan dengan melibatkan partisipasi petani/peternak yang tergabung dalam Kelompok Tani/Kelompok Ternak/Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani baik laki-laki maupun perempuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan. Pola ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan rasa memiliki dalam mengembangkan kegiatan. Seluruh komponen dalam kegiatan ini dilaksanakan melalui mekanisme bantuan pemerintah yang diserahkan kepada petani.

3.2 Tahapan Pelaksanaan

a. Persiapan

1) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan

Petunjuk pelaksanaan kegiatan disusun oleh dinas kabupaten/kota yang memperoleh alokasi kegiatan pilot project yang disesuaikan dengan kondisi daerah sebagai penjabaran dari pedoman umum yang diterbitkan oleh pusat.

2) Koordinasi dengan instansi terkait

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan instansi terkait di kabupaten/kota dan pemerintahan desa agar diperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

3) Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL),

Penetapan CPCL didasarkan usulan Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

4) Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi bertujuan agar penerima manfaat mengetahui dengan jelas tentang rencana dan metode pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

5) Pembukaan Rekening Kelompok

Kelompok penerima manfaat kegiatan membuka rekening di Bank Pemerintah yang sudah bekerjasama dengan KPPN dan dalam keadaan aktif (dinyatakan dalam Surat Keterangan Aktif).

6) Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) didasarkan pada hasil musyawarah/persetujuan Kelompok Penerima Manfaat yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan Tim Teknis Kabupaten yang diketahui oleh Kepala Dinas. RUKK mencantumkan komponen pembelian kambing/itik, pembelian Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO), pembangunan kandang, pakan (untuk itik), dan obat-obatan. Dalam penyusunan RUKK apabila terdapat penggunaan dana dari APBD atau swadaya petani agar dicantumkan. Contoh RUKK dapat dilihat di Lampiran 1.

7) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Pelaksanaan Kegiatan

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dibuat sebagai komitmen pelaksana kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender pada TA.2019 mulai dari awal hingga akhir kegiatan berikut pemeliharaannya. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dapat dilihat di lampiran 2.

8) Transfer Dana

Mekanisme transfer dana mengacu pada pedoman pengelolaan dana bantuan pemerintah kepada Kelompok Penerima Manfaat yang diterbitkan oleh Ditjen PSP TA 2020.

b. Pengembangan Pertanian (Farm Development)

(1) Pengadaan Ternak

A. TERNAK KAMBING

Kambing yang akan diusahakan dapat berupa kambing perah atau pedaging jenis PE (Peranakan Ettawa) dengan kriteria kambing siap kawin (umur 1 tahun atau lebih) untuk jantan, dan minimal 9 bulan untuk kambing betina dan memiliki ciri sebagai berikut:

(a) Betina

- (i) Memiliki telinga yang panjang, menggantung, dan terkulai
- (ii) Badan berbentuk bajji
- (iii) Mempunyai bulu lebat yang panjang pada kedua kaki belakang

- (iv) Mata cerah bersinar
 - (v) Kulit halus dan bulu klimis
 - (vi) Tulang punggung kuat dan rata
 - (vii) Rongga perut besar (tulang rusuk terbuka)
 - (viii) Dada dan pinggul lebar
 - (ix) Kaki kuat dan simetris
 - (x) Ambing berkembang baik dan simetris
 - (xi) Puting susu dua buah dan normal
 - (xii) Sehat dan bebas dari penyakit hewan menular
 - (xiii) Tidak cacat fisik dan alat reproduksi
- (b) Pejantan
- (i) Tulang punggung kuat dan rata
 - (ii) Kaki kuat dan simetris
 - (iii) Mata cerah bersinar
 - (iv) Kulit halus dan bulu klimis
 - (v) Testis dua buah normal, simetris, dan kenyal
 - (vi) Penis normal
 - (vii) Libido baik
 - (viii) Sehat dan bebas dari penyakit hewan menular
 - (ix) Tidak cacat fisik dan alat reproduksi

B. TERNAK ITIK

Bibit itik yang akan diusahakan berasal dari bibit yang berkualitas (sehat/bibit unggul) dengan ciri sebagai berikut:

- (i) Umur minimal bibit sekitar 4-7 bulan
- (ii) Memiliki bulu yang bagus dan kering
- (iii) Kedua mata terbuka
- (iv) Bibit bergerak lincah dan tidak cacat

(2) Pengadaan Pakan

A. TERNAK KAMBING

Kelompok tani penerima manfaat bersedia memenuhi kebutuhan pakan kambing, seperti rerumputan, legum, dan limbah hasil pertanian sebagai sumber energi, protein, dan vitamin bagi ternak kambing. Kebutuhan mineral dalam pakannya, pemberiannya dapat dicampur dengan bahan pakan lainnya. Sedangkan untuk

ketersediaan air bersih dapat dipenuhi sesuai dengan baku mutu kebutuhan.

Adapun jenis-jenis pakan sebagai sumber nutrisi dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sumber Nutrisi Pakan Kambing

Sumber Nutrisi	Jenis Pakan
Pakan sebagai sumber energi	Rumput, dedaunan, onggok, dedak padi, dedak gandum, jagung, sorgum, singkong, dll
Pakan sebagai sumber protein	Legum, limbah industri hasil pertanian (bungkil kedelai, bungkil kelapa, ampas tahu/kecap, dll)
Pakan sebagai sumber mineral	Gram dapur, kapur, tepung tulang, dll
Pakan sebagai sumber vitamin	Jagung kuning, hijauan segar, wortel, mineral miks

Kebutuhan hijauan pakan disesuaikan dengan kondisi fisiologis kambing yang dibudidayakan (Tabel 2).

Tabel 2. Rasio Pakan Rumput dan Legum

Kondisi Fisiologis Ternak	Komposisi	
	Rumput	Legum/ dedaunan
Dewasa	75	25
Bunting	60	40
Menyusui	50	50
Anak Lepas Pisah	60	40

B. TERNAK ITIK

Kebutuhan pakan ternak itik pada tahap awal akan dibantu melalui bantuan pemerintah, dan selanjutnya disiapkan oleh penerima manfaat. Pakan yang diberikan dapat berasal dari pabrikan atau diolah sendiri. Bahan pakan yang diolah sendiri dapat berasal dari jagung, dedak padi, keong mas, sisa sayuran, dan lain-lain. Jumlah, waktu maupun cara pemberian pakan disesuaikan dengan umur itik.

(3) Pembuatan Kandang

A. TERNAK KAMBING

Kandang untuk kambing adalah kandang komunal berbentuk panggung. Kandang berlantai tanah tidak diperbolehkan karena akan menyulitkan dalam pengumpulan kotoran dan urine kambing, yang dapat berdampak terhadap munculnya berbagai penyakit.

Syarat minimal kontruksi kandang kambing :

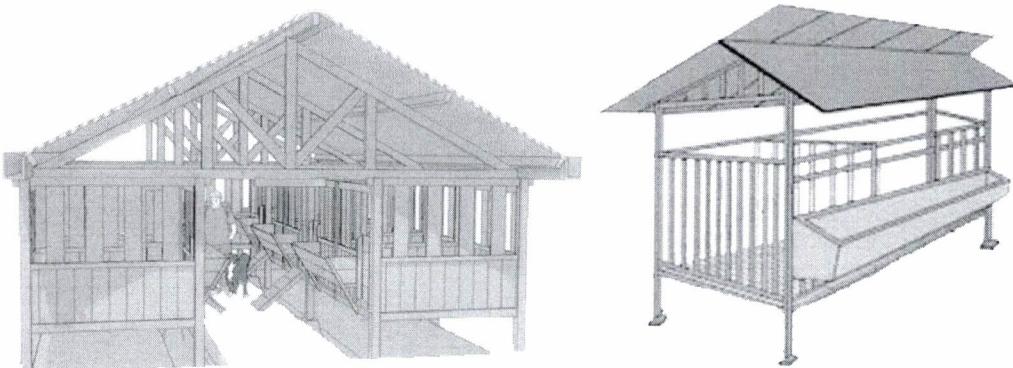
1. Kontruksi harus kuat;
2. Kandang panggung, jarak antar slat/papan lantai dibuat tidak terlalu jarang dan juga tidak terlalu rapat, karena apabila terlalu jarang menghindari agar kaki tidak terperosok dan jika terlalu rapat kotoran tidak bisa jatuh ke bawah kandang. Selain itu, lantai agar dibuat miring sehingga mudah dalam membersihkan kotoran.
3. Drainase dan saluran pembuangan limbah yang baik;
4. Memenuhi persyaratan sanitasi;
5. Tersedianya tempat penampungan pakan pada kandang;
6. Luas kandang memenuhi persyaratan, dengan daya tampung minimal sebagai berikut :

Jantan Dewasa $1 \times 1,2 \text{ m}^2/\text{ekor}$

Betina dewasa $0,7 \times 1 \text{ m}^2/\text{ekor}$

Induk laktasi $0,7 \times 1 \text{ m}^2 + 0,5 \text{ m}^2/2$
 ekor

Jantan/betina dewasa $0,75 \text{ m}^2/\text{ekor}$



Gambar 3. Contoh Design Kandang Kambing

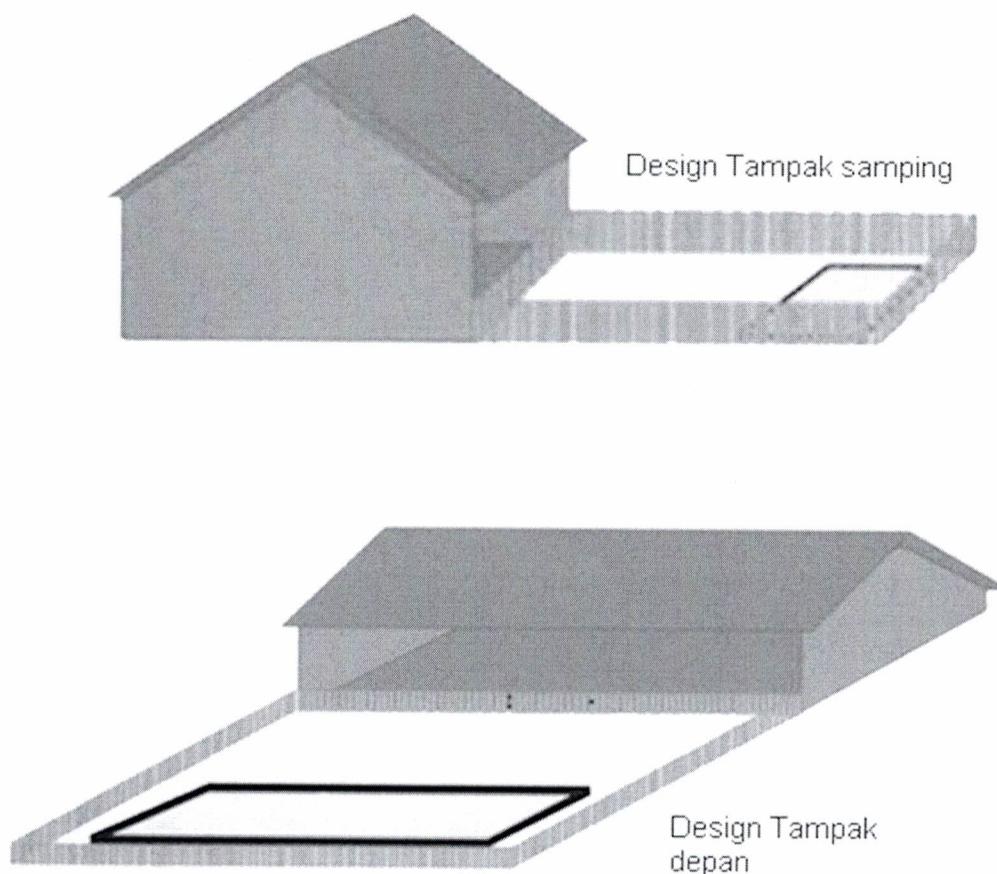
B. TERNAK ITIK

Ukuran kandang itik disesuaikan dengan kebutuhan, memperhatikan jumlah itik yang akan menempatinya agar dapat tumbuh dan tidak mudah terserang penyakit.

Kandang dibangun menyesuaikan dengan luas lahan dan kontur tanah. Daya tampung minimal kandang untuk itik siap telur (umur

6 – 7 minggu) adalah 5 ekor/m². Dalam pembangunan kandang itik, beberapa hal yang harus diperhatikan :

- (i) Kebersihan dan permukaan kandang
- (ii) Temperatur
- (iii) Penerangan cahaya
- (iv) Pagar/dinding
- (v) Kolam air untuk tempat minum



Gambar 4. Contoh Design Kandang Itik

(4) Pengolahan Pupuk Organik

Kelompok penerima manfaat menyediakan lahan untuk pengolahan pupuk organik di sekitar lokasi kandang. Lokasi pengolahan sebaiknya tidak terlalu jauh dari lokasi kandang untuk mempermudah mengumpulkan limbah ternak. Kotoran dan urine kambing/itik merupakan bahan dasar pupuk organik yang berkuàlitas tinggi karena mengandung C organik yang dibutuhkan oleh tanaman dan kesuburan tanah. Komposisi kotoran kambing dan

urine kambing/itik akan menghasilkan pupuk organik dengan kandungan hara yang lebih seimbang dibandingkan dengan pupuk organik lainnya. Prinsip dasar pembuatan pupuk organik adalah proses pengomposan atau fermentasi. Pengomposan pupuk kandang bermanfaat untuk menguraikan bahan-bahan organik yang terdapat dalam kotoran, sehingga menjadi sumber-sumber hara yang stabil dan bisa diserap tanaman. Proses pengomposan mengeluarkan panas, energi panas ini sekaligus juga akan membunuh bibit penyakit dan mematikan biji-bijian gulma. Sehingga pupuk kandang yang telah dikomposkan relatif lebih aman dari penyakit dan hama tanaman. Kotoran kambing yang akan dikomposkan sebaiknya dihancurkan terlebih dahulu dengan menggunakan alat pencacah agar lebih mudah terurai.

Oleh sebab itu dalam pengelolaan pupuk organik, kelompok tani penerima manfaat sebaiknya menyediakan tempat pengomposan (bak fermentasi) dan tempat penyimpanan alat pencacah. Ukuran dan design tempat pengomposan/bak fermentasi serta tempat penyimpanan alat pencacah disesuaikan dengan kondisi lokasi dimana kandang komunal dibangun. Alat pencacah yang digunakan minimal memiliki kapasitas 50 kg/jam dengan kekuatan minimal 6 PK.

(5) Pengelolaan dan Pemeliharaan

Pengelolaan dan pemeliharaan hasil kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kelompok pernirima manfaat secara swadaya. Pengelolaan dan pemeliharaan lebih detil dapat mengacu pada pedoman/petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas Peternakan atau BPTUHPT (Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak).

3.3 Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan ternak kambing dan itik dilakukan oleh kelompok penerima manfaat menyesuaikan dengan kondisi lokal/setempat dan kesepakatan anggota kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua kelompok bersama anggota menyusun kesepakatan jadwal petugas pengelola ternak, petugas pengelola administrasi dan keuangan serta cara bagi hasil ternak kambing.

- b. Kelompok penerima manfaat menyediakan lahan untuk pengelolaan ternak kambing secara komunal dan pengolahan pupuk organik.
- c. Kelompok penerima bertanggung jawab atas;
 - (1) Menyediakan dan memberikan pakan ternak kambing/itik. Untuk pemilihan jenis kambing perah (PE), kelompok bersedia mencukupi kebutuhan pakan kambing yang berasal dari hijauan pakan ternak di sekitar lokasi.
Sedangkan untuk ternak itik, setiap anggota berkewajiban untuk memberi pakan ternak secara bergantian.
 - (2) Pengelolaan administrasi dan keuangan hasil ternak maupun pembuatan/penjualan pupuk organik.
 - (3) Menjaga kebersihan kandang dan kesehatan lingkungan sekitarnya;
 - (4) Melakukan pemeriksaan kesehatan ternak dan merawat serta memisahkan ternak yang sakit;
 - (5) Pemanfaatan dan pengolahan limbah ternak sehingga menghasilkan pupuk organik
 - (6) Memanfaatkan pupuk organik untuk pemupukan di lahan pertanian
 - (7) Membuat laporan kegiatan, baik fisik maupun keuangan.
 - (8) Membuat Berita Acara (BA) apabila terjadi kematian atau kehilangan ternak, yang diketahui oleh petugas yang berwenang.
 - (9) Mengembangiakkan atau sekurang-kurangnya mempertahankan populasi ternak yang telah dialokasikan dengan merawat ternak sebaik-baiknya dan mengantinya apabila ada yang hilang atau mati.
- d. Kelompok penerima manfaat bertanggung jawab atas pencatatan penerimaan/pengeluaran hasil pengelolaan ternak, seperti dokumen-dokumen keuangan yang merupakan bukti sah transaksi dan melaporkan secara rutin penerimaan/pengeluaran hasil ternak.

3.4 Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 3.

3.5 Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender melalui integrasi kambing atau itik pada lahan pertanian dibiayai dari DIPA Satker Ditjen PSP TA. 2020 dengan unit cost Rp. 80.000.000,- untuk kambing dan Rp. 50.000.000,- untuk itik.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender melalui pengintegrasian ternak kambing/itik pada areal tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan:

4.1 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender, dilakukan oleh petugas pusat dan petugas daerah (propinsi dan kabupaten/kota). Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui pengumpulan data pada tahap persiapan, proses pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan evaluasi ditujukan agar pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan baik dan benar.

4.2 Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dibuat oleh petugas pusat dan petugas daerah (kabupaten/kota), sebagai berikut:

- a. Pelaporan monitoring dilaksanakan pada tahapan persiapan, pertengahan pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan dengan form pada Lampiran 4.
- b. Pelaporan evaluasi kegiatan dilaksanakan pada pertengahan pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan dengan form pada Lampiran 5.
- c. Pelaporan akhir kegiatan (mulai dari tahap persiapan sampai dengan akhir kegiatan) dilaksanakan pada akhir tahun oleh petugas pusat dan daerah pada Lampiran 6.

Laporan disampaikan ke Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Gd. D lantai 8, Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550. Atau melalui email : evalap.psp@gmail.com

BAB V

INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pilot project optimalisasi lahan responsive gender melalui pengintegrasian ternak kambing pada areal tanaman hortikultura/tanaman pangan/peternakan, diperlukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan. Adapun indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

5.1 Indikator Masukan (Input)

- a. Anggaran berasal dari pemerintah (APBN) maupun swadaya kelompok penerima manfaat.
- b. Perangkat Peraturan Pemerintah, Perda, kebijakan dan pedoman.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM)
- d. Prasarana Penunjang Kerja (fasilitas kantor dan lapangan).

5.2 Indikator Keluaran (Output)

- a. Terlaksananya Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender sebanyak 25 paket;
- b. Tersusunnya data terpisah dari pelaksanaan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender di 11 lokasi.

5.3 Indikator Keberhasilan (Outcome)

- a. Meningkatnya partisipasi petani (laki-laki dan perempuan) dalam upaya Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender melalui pengintegrasian ternak kambing atau itik pada areal tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- b. Meningkatkan hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

5.4 Indikator Manfaat (Benefit)

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pendapatan petani.

5.5 Indikator Dampak (Impact)

- a. Berkurangnya biaya penyediaan dan penggunaan pupuk anorganik.
- b. Meningkatnya gizi keluarga petani dan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

Isu gender dalam bidang pertanian terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terefleksi dalam hal akses terhadap peluang dan kesempatan, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumber daya, serta perolehan manfaat dari hasil-hasil pertanian. Untuk upaya-upaya tersebut diperlukan adanya analisis dengan perspektif gender pada saat menyusun kegiatan di bidang pertanian dari tahapan perencanaannya, penganggarannya, pelaksanaannya, monitoring dan evaluasinya. Salah satunya melalui kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender Integrasi Ternak Kambing/Itik. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan kuantitas dan kapasitas perempuan yang selama ini mungkin belum mendapatkan kesempatan yang sama di bidang pertanian.

Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender yang dilaksanakan dengan pola pemeliharaan yang mengintegrasikan ternak kambing atau itik pada lahan pertanian, diharapkan dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Manfaat yang diperoleh dari pola pemeliharaan yang mengintegrasikan ternak pada lahan pertanian dengan mengoptimalkan keterlibatan peran laki-laki dan perempuan secara proporsional, pada waktu yang sama akan memperoleh hasil tanaman maupun hasil ternak tanpa mengganggu produksi. Dengan demikian nilai tambah petani dapat dimaksimalkan.

DIREKTUR JENDERAL,



SARWO EDHY

NIP 196203221983031001

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK
Pilot Project Optimalisasi Lahan
Integrasi Ternak Kambing-Responsive Gender
TA. 2020

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK
Pilot Project Optimalisasi Lahan
Integrasi Ternak-Itik Responsive Gender
TA. 2020

No.	Uraian/Kegiatan	Perincian			Sumber Dana		
		Volume	Harga Satuan	Total	Bantuan Pusat	APBD	Swadaya
1.	Kambing Dewasa [‡]						
- Jantan	ekor						
- Betina	ekor						
2.	Alat Pemerasah	unit					
3.	Kandang Kambing	m ²					
	TOTAL						

[‡] minimal 25 ekor kambing (proporsi jantan:betina = 1:5)

[‡] minimal 100 ekor itik (proporsi jantan:betino = 1:4)

Menyetujui
 Ketua
 Kelompok Tani/Ternak
 {.....}
 1.
 2.
 3.

Menyetujui
 Ketua
 Kelompok Tani/Ternak
 {.....}
 1.
 2.
 3.

Mengetahui
 Kepala Dinas Kab/Kota
 {.....}

Mengetahui
 Kepala Dinas Kab/Kota
 {.....}

{.....}

**JADWAL TENTATIVE PELAKSANAAN PILOT PROJECT OPTIMALISASI LAHAN
RESPONSIVE GENDER TA. 2020**

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Keterangan
1.	Pembuatan Juknis													
2.	Koordinasi dengan instansi terkait													
3.	Sosialisasi													
4.	CPCL													
5.	Pembuatan Rekening Kelompok													
6.	Penyusunan RUKK													
7.	Transfer Dana													
8.	Pengembangan Pertanian													
9.	Monitoring													
10.	Evaluasi													
11.	Pelaporan													

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Pelaksanaan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender
TA. 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Jabatan

Kelompok Tani/Ternak :

Alamat

Menyatakan :

1. bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender, TA. 2019 mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaannya ke depan.
2. Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas terdapat temak yang mati, maka kami bersedia membuat surat pernyataan kematian yang disahkan oleh Mantri Ternak setempat.
3. Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas terdapat temak yang hilang atau mati, maka kami bersedia untuk mengganti. Demikian surat pernyataan ini dibuat.

....., 2020

Ketua Kelompok Tani/Ternak

(.....)

FORM EVALUASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender

TA. 2020

No	Kegiatan Agribisnis Temak	Laki 2/AL (%)	Pr/Apr (%)	Keterangan
A. PARTISIPASI				
1	Perencanaan tetak dan layout serta pembuatan			
2	Sebagai pengurus Kelompok			
3	Pembuatan Kandang			
4	Pembelian bibit/ temak temak			
5	Membeli pakan secara rutin			
6	Membeli rsihkan kandang			
7	Mengeluarkan temak dan melepas di luar kandang			
8	Mengandengkan temak			
9	Mengumpulkan kotoran/ urine temak			
10	Memelihara temak			
11	Vaksinasi			
13	Penjualan hasil temak temak			
14	Menyimpan hasil penjualan			
<i>Rata-rata</i>				
B. AKSESIBILITAS				
1	Mengakses media (kredit usaha terni dan berapa % bunga/bulan)	Bunga% /bulan, moda yang diakses Rp.		
2	Mengakses informasi tentang cara memperoleh dana/bantuan			
3	Sosialisasi tentang peternakan temak temak			
4	Mengakses bibit unggul temak berkualitas/bibit			
5	Mengakses teknologi yang akan digunakan			
6	Mengakses bantuan peralatan			
7	Meminta bantuan kotoran/ urine temak			
8	Pelatihan Kelompok tan			
9	Mengakses harga/pasar yang ayak dari hasil temak			
<i>Rata-rata</i>				

FORM MONITORING PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender

TA. 2020

DATA UMUM

- Propinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Nama Instansi Dinas :
- Alamat :
- Nama Program :
- Nama Kegiatan :
- Indikator Hasil Gender :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN	
PEKERJAAN	KEGIATAN PILOT PROJECT OPTIMALISASI LAHAN RESPONSIVE GENDER
Bulan Tahun Dua Pada hari ini, Rabu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :	Nomor : Tanggal :

No	Kegiatan Agribisnis Ternak	Laki2/AL (%)	Pri/Apr (%)	Keterangan
C. KONTROL DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN				
1 Yang lebih berinisiatif dalam mencari/mengakses dana				
2 Yang lebih melakukan kontrol dalam pemanfaatan/ pengelolaan dana				
3 Yang lebih menentukan penggunaan jenis dan takaran ransum/pakan serta waktu pemberian pakan yang tepat serta pemeliharaannya				
4 Yang lebih menentukan tingkat upah buruh mulai pembersihan/kandang dan sanitasi ternaknya				Jika menggunakan tenaga luar
5 Dalam penentuan sistem bagi hasil/ penyetoran ternak yang diusahakan				
6 Dalam penentuan kapan hasil termaknya akan dijual, tingkat harga dan rencana penggunaan hasil penjualan hasil ternak				
7 Yang lebih menentukan penggunaan hasil ternak				
D. MANFAAT				
1 Siapa yang lebih mendapatkan manfaat dari bantuan modal yang diberikan ke petani/ peternak dalam upaya peningkatan produksi daging dan populasi ternak ternak				
2 Siapa yang lebih mendapatkan manfaat dan peningkatan pendapatan peternak, dan hasil peningkatan produksi daging dan populasi ternak (hasil daging/ ternak yang dijual)				
3 Manfaat yang diperoleh terhadap gizi dengan memelihara ternak yang dapat dengan mudah dikonsumsi dagingnya				
4 Peningkatan ketetapan sumberdaya peternak dalam agribisnis pemeliharaan ternak melalui pelatihan manajemen peternakan				
5 Manfaat yang diperoleh dari hasil penjualan produk organik dari kotoran dan urine				

Pada hari ini, Rabu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :	Bulan Tahun Dua Pada hari ini, Rabu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ketua Tim Teknis Bantuan Pemerintah Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender	Nomor : Tanggal :
Jabatan : Dinas untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA atau yang Memeriksa Hasil Pekerjaan	Jalan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang Melaksanakan Pekerjaan
Alamat : Dea selaku Ketua Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah berupa : Uang untuk mendukung Kegiatan Pilot Project Responsive Gender	Alamat : Dea selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang Melaksanakan Pekerjaan
Propinsi : Kecamatan : Keconakan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan dengan baik berupa : Jenis Pekerjaan : Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender Paket Bantuan Pemerintah Berupa : Uang Rp. : 1 Paket	Propinsi : Kecamatan : Keconakan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan dengan baik berupa : Jenis Pekerjaan : Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender Paket Bantuan Pemerintah Berupa : Uang Rp. : 1 Paket
Volume Pekerjaan : Jumlah Dana Lokasi Berada di Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota Propinsi :	Volume Pekerjaan : Jumlah Dana Lokasi Berada di Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota Propinsi :
Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan dengan baik berupa :	
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
PIHAK KEDUA Yang Memeriksa	
Ketua Kelompok Yang Melaksanakan Pekerjaan	
Mengetahui, KEPALA DINAS KABUPATEN	
NIP Ketua Tim Teknis	
..... Mengetahui, NIP KABUPATEN	
..... NIP Ketua Tim Teknis	

< KOP SURAT >

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
Penyelesaian Pekerjaan**
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pimpinan/Ketua :
Alamat :
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama :
NIP :
Jabatan : PPK Satker :
Alamat :
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerja Sama nomor;
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah total dana yang telah diterima : (.....)
- b. Jumlah total dana yang dipergunakan : (.....)
- c. Jumlah total sisa dana : (.....)

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan sebesar telah disimpan sesuai menerima dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa dengan nilai sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN)terlampir. *)

5. PIHAK KESATU telah menyertorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN)terlampir. *)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
PPK Satker
.....

.....
NIP
Mengatahui,
KEPALA DINAS
KABUPATEN
.....

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.

PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN	NOMOR :
KEGIATAN PILOT PROJECT OPTIMALISASI LAHAN RESPONSIVE GENDER	Tanggal :	

Pada hari ini, Bulan Tahun Dua
Ruba Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Jabatan	Alamat	Kabupaten
: Ketua Tim Teknis Bantuan Pemerintah Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender	: Dinas untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA atau yang Memeriksa Hasil Pekerjaan	: Desa Kecamatan Kabupaten untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang Melaksanakan Pekerjaan	: Kecamatan Kabupaten selaku Ketua Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah berupa : Uang untuk mendukung Kegiatan Pilot Project Responsive Gender
Nama	Jabatan	Alamat	Jenis Pekerjaan Paket Bantuan Pemerintah Berupa : Uang Jumlah Dana Volume Pekerjaan Lokasi Berada di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Propinsi
: Ketua Kelompok Tani	: 1 Paket	:	: Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan dengan baik berupa :

Selanjutnya PIHAK KEDUA melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU telah memeriksa hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas bantuan pemerintah berupa : Uang dalam rangka Kegiatan : Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender dan pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Melaksanakan
.....
Ketua kelompok
.....
NIP
Ketua Tim Teknis
.....

.....
NIP
Mengatahui,
KEPALA DINAS
KABUPATEN
.....

.....
NIP